

# DONGKRAK KEMISKINAN, Salurkan Kompensasi untuk Kegiatan Produktif

Oleh Raja Hendrik Napitupulu

06/05/2008 23:26:49 WIB

JAKARTA, Investor Daily



Pemerintah diminta menyiapkan program kompensasi untuk rakyat miskin sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Program itu sebaiknya berupa kegiatan yang produktif sehingga tak hanya berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Konsep pengentasan kemiskinan harus difokuskan untuk mendorong UKM berproduksi lebih agresif guna memberdayakan masyarakat miskin. Program yang selama ini berjalan, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), dinilai tidak mendidik sehingga harus dihentikan.

Demikian rangkuman *Investor Daily* dari wawancara dengan guru besar FE-UGM Mudrajad Kuncoro, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hari Susanto, Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI Emir Moeis, Wakil Ketua Panggar DPR RI Harry Azhar Azis, ekonom Indef Bustanul Arifin, dan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, di Jakarta, Senin (5/5).

Hari Susanto memprediksi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30% akan mendongkrak angka kemiskinan 2008 mencapai hampir 40 juta jiwa. Artinya, terjadi peningkatan kemiskinan pada 2008 sebanyak 1,88 juta jiwa, dari 16,58% atau 37,7 juta jiwa (2007), menjadi 18,04% atau 39,58 juta jiwa.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM pasti menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, yang akhirnya meningkatkan angka kemiskinan 2008. "Peningkatan subsidi BLT, hanya memberi ikan kepada masyarakat, bukan kailnya. Artinya, setelah BLT selesai angka kemiskinan akan meningkat lagi," jelasnya.

Setidaknya ada tiga program yang telah diluncurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain program BLT, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Para pengamat menilai program-program tersebut cakupannya masih sangat kecil sehingga tidak efektif mengentaskan kemiskinan.

## Ciptakan Lapangan Kerja

Mudrajad Kuncoro mengatakan, program pengentasan kemiskinan harus menciptakan lapangan pekerjaan. "Hakekat pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan bagaimana memasarkan hasil tangkapannya," tuturnya.

Untuk itu, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu oleh menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri koperasi dan UKM, dan badan perencanaan dan pembangunan nasional. Pemerintah, kata dia,

harus menghentikan program pengentasan kemiskinan yang bersifat tidak mendidik, seperti BLT.

Hal senada diungkapkan Emir Moeis dan Harry Azhar Azis. Menurut Emir, pemberian BLT tidak bisa dipercaya dapat mengurangi kemiskinan. "Terbukti, setelah BLT diberikan jumlah kemiskinan pasti naik lagi," ujarnya.

Harry Azhar Azis mendesak pemerintah untuk mengalokasikan penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin. Ia memperkirakan jumlahnya sekitar Rp 25,88 triliun. Dengan asumsi jumlah UMKM sekitar 48,9 juta maka masing-masing UMKM mendapat dana bergulir sekitar Rp 529,24 ribu.

Selain itu, Harry mengusulkan agar defisit APBN-P 2008 tetap 2,1% terhadap PDB, sehingga ada dana lebih Rp 8,4 triliun. Dana itu sebaiknya dialokasikan pada usaha padat karya seperti penambahan dana infrastruktur perdesaan dalam dana alokasi khusus (DAK) daerah sehingga tercipta sekitar 700 ribu lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan 3,15 juta jiwa. "Bappenas harus mampu membuat *framework* untuk menyerap dana Rp 8,4 triliun, menjadi lapangan kerja di luar BLT," ungkapnya.

Ekonom Indef Bustanul Arifin juga menilai, pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan BLT seperti pada 2005 untuk mengatasi pembengkakan angka kemiskinan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Program semacam itu tidak benar karena hanya bagi-bagi uang. Harusnya program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan masyarakat," ujar dia.

Ichsanuddin Noorsy mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang adil, melakukan pendampingan, pelatihan, pemberdayaan dan pembiayaan terhadap orang miskin. "Jangan tanya berapa dananya karena nyatanya pemerintah mampu membiayai orang kaya, seperti tetap membayar bunga rekapitalisasi perbankan," ungkapnya.

### **Skenario Pengentasan**

Sementara itu, Sekretaris Menteri Negara PPN Syahril Loetan menyatakan telah menyiapkan seluruh skenario, termasuk skenario pengentasan kemiskinan jika opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan.

Menurut dia, pihaknya akan mengantisipasi dampak kenaikan harga, sebab Undang-Undang (UU) mengatakan dan mengamanatkan agar pemerintah menjaga masyarakat miskin.

Terkait pemberian BLT, Syahril mengatakan ada kemungkinan akan diterapkan di Pulau Jawa. Sebab, pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat yang sudah sedemikian rendah melalui BLT.

"Skenario itu ada, belum final untuk diputuskan, sebab sekitar 60% pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli makanan " kata dia. **(hut/idi)**

Sumber:

[http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=54966](http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54966)